

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada program pembiayaan perumahan Tapera dan FLPP, didapatkan simpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan penyalur program pembiayaan khususnya FLPP telah dilaksanakan sesuai rencana dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Sampai dengan saat ini, program FLPP berhasil mencapai tingkat ketepatan waktu yang optimal, dengan realisasi penyaluran yang selalu mencapai 100% setiap tahunnya. Sedangkan penyaluran program pembiayaan Tapera masih sangat kecil dan jauh dari target, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor dana, regulasi yang belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan minat masyarakat terhadap Tapera.
- 2) Kriteria pengukuran keberhasilan program Tapera dan FLPP yang telah diterapkan BP Tapera baik dari sisi program pembiayaan perumahan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara lain ketepatan waktu, ketepatan anggaran, kinerja, penggunaan dan keterhunian dari rumah, dan kepuasan MBR. Selain itu terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung

- 3) keberhasilan program Tapera dan FLPP antara lain dana/anggaran, komitmen pimpinan, regulasi, pihak eksternal, sistem/teknologi informasi
- 4) Dalam pelaksanaan program Tapera dan FLPP terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi BP Tapera yang kedepannya bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan program penyaluran pembiayaan perumahan. Salah satu yang krusial belum adanya regulasi mengenai penetapan besaran iuran peserta Tapera, sehingga untuk saat ini BP Tapera hanya menyalurkan dan mengelola dana Tapera yang merupakan peralihan dari Bapertarum dan belum mendapatkan pendanaan dari peserta baru.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait dengan analisis skema pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan perumahan dalam upaya mengurangi *backlog* perumahan, antara lain :

- 1) Diperlukan tim teknis yang lebih banyak sehingga dapat dilakukan pengawasan secara menyeluruh dalam penyaluran pembiayaan perumahan baik pada Tapera maupun FLPP, sehingga rumah yang diterima masyarakat memang layak sesuai standar teknis serta tepat sasaran kepada MBR. Selain itu BP Tapera dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan dengan membuat sistem absensi secara rutin dengan melampirkan bukti dokumentasi dan survei keterhunian bagi penerima bantuan perumahan.
- 2) Perlunya komunikasi dan kerjasama di antara pihak-pihak terlibat dalam penyaluran pembiayaan perumahan, dimulai dengan penetapan angka *backlog*

yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian perlunya intervensi Pemerintah dari sisi *supply* untuk meningkatkan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan guna menilai ketepatan atau kekurangan program tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, program pembiayaan perumahan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan *backlog* dan dijalankan secara efektif.